

## SKRIPSI

### PENANGANAN PKL DI SURABAYA

(STUDI DESKRIPSI UPAYA PENATAAN DAN PENERTIBAN PKL DI SURABAYA OLEH PEMERINTAH KOTAMADYA SURABAYA DENGAN AREA SAMPLING JL. TUNJUNGAN, JL. PAHLAWAN, DAN JL. RAYA GUBENG)



KIR  
FEB. P 09/04  
Pri  
P.

PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA

OLEH :

**ARIYA PRIMINDRA**

NIM : 079815807

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2003**

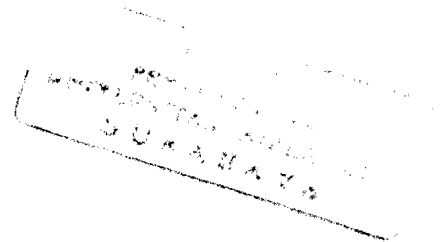
# **SKRIPSI**

**A B**

## **PENANGANAN PKL DI SURABAYA**

**( STUDI DESKRIPSI UPAYA PENATAAN DAN PENERTIBAN PKL DI SURABAYA OLEH  
PEMERINTAH KOTAMADYA SURABAYA DENGAN AREA SAMPLING JL  
TUNJUNGAN, JL. PAHLAWAN, DAN JL. RAYA GUBENG )**

**Diajukan Sebagai salah satu persyaratan untuk  
Memperoleh gelar S1**



**OLEH :**

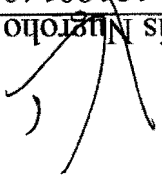
**ARIYA PRIMINDRA**

**NIM : 079815807**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2003**

# LEMBAR PERSETUJUAN

Pembimbing Skripsi

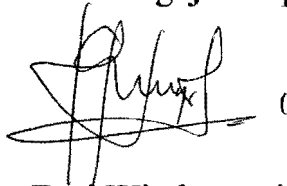
  
Drs. Kris Nuztoho MA  
NIP. 131801408

## LEMBAR PENGESAHAN

Menyatakan bahwa skripsi ini telah diuji pada tanggal 18 Juni 2003 pkl 12.00, dengan tim penguji Skripsi, sebagai berikut :

Ketua

Dosen Penguji Skripsi



Dra Dwi Windyastuti MA  
NIP 131801643

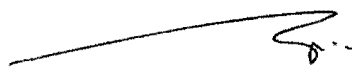
Anggota

Dosen Penguji Skripsi I



Drs. Kris Nugroho MA  
NIP 131801408

Dosen Penguji Skripsi II



Dra Siti Aminah MA  
NIP 131836624

**Universitas Airlangga**  
**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**  
**Program Studi Ilmu Politik**  
**Surabaya, 2003**

### **ABSTRAK**

Nama : Ariya Primindra  
NIM/NPM : 079815807  
Judul : **PENANGANAN PKL DI SURABAYA**

( STUDI DESKRIPSI UPAYA PENATAAN DAN PENERTIBAN PKL DI SURABAYA OLEH PEMERINTAH KOTAMADYA SURABAYA DENGAN AREA SAMPLING JL. TUNJUNGAN, JL. PAHLAWAN, DAN JL. RAYA GUBENG )

Keputakaan : Texbook 26 eksemplar, jurnal 14 eksemplar, surat kabar 22 eksemplar, dan produk hukum 2 buah.

Jumlah Halaman : 3 Halaman ( lembar persetujuan, pengesahan dan persembahan), abstrak 3 halaman, daftar isi 5 halaman, table 52 halaman, dan 2 bagan , isi 237 halaman, dan 6 macam lampiran

Penangan PKL di Surabaya ( Studi Deskripsi Upaya Peataan dan Penertiban PKL di Surabaya oleh pemerintah Kotamadya Surabaya dengan Area Sampling Jl. Tunjungan, Jl. Pahlawan, dan Jl. Raya Gubeng ), diangkat penulis sebagai judul karena penulis berkeinginan untuk mengangkat deskripsi fenomena PKL dan penangnannya oleh Pemerintah Kota Surabaya.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah mempertanyakan bagaimana peran pemerintah kota Surabaya dalam penanganan PKL, sejauhmana kebijakan penanganan PKL dapat mencerminkan dan menjalankan kapabilitas regulative system, dan sejauhmana kebijakan publik tentang penanganan PKL bersifat responsive terhadap aspirasi PKL.

Penulis berusaha menjawab ketiga pertanyaan diatas dengan melihat objek kajian dalam dua sisi, baik pemerintah kota Surabaya sebagai institusi pembuat dan pelaksana

kebijakan dan PKL yang dalam hal ini sebagai subjek hukum/ objek penderita atau dengan kata lain sebagai sasaran dari kebijakan Pemerintah Kota.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan teknik koleksi data dokumen, literatur dan wawancara. Penentuan informan ditentukan atas keterlibatan dalam proses pemberlakuan kebijakan penanganan PKL dan dampak dari kebijakan itu sendiri. Sample pertama, adalah para fungsionaris birokrat pemerintah kota. Sedangkan sample kedua, adalah para PKL yang are sampling dan jumlah populasinya didapat dengan cara non random dan sistimatic.

Adapun kerangka pemikiran yang digunakan dalam menganalisa masalah adalah konsep Kebijakan Publik, konsep sector informal, teori-teori structural fungsional, dan teori ekologi perkotaan

Dilapangan fenomena PKL dijabarkan mulai dari asala mula sector informal tersebut muncul dan eksis, dimana eksistensinya dikemudian hari menimbulkan gangguan pada area publik berupa merusak keindahan, kurangnya kebersihan, dan kesemrawutan lalu-lintas, dan lain sebagainya. Hingga keluarlah kebijakan pengaturan PKL, yakni SK walikota tentang kebijakan penertiban 7, 14, dan 21 jalur. Kebijakan tersebut didasari kebijakan sebelumnya yakni, Perda No 22 tahun 1987, dan SK walikota No 9 tahun 1999.

Kebijakan penanganan PKL merupakan suatu produk hukum suatu sistim politik, karena sistim tersebut memiliki wewenang dan otoritas dalam regulasi. Suatu regulasi tidaklah cukup jika hanya pada tahapan selesai pembuatan tanpa sampai pada tahap penerapan. Sangatlah disayangkan bila dalam penerapan regulasi tersebut tidak komprehensif dan menyentuh akar permasalahan yang ada. Tentunya hal tersebut akan kembali mempertanyakan apakah regulasi kebijakan yang dibuat dulunya mengakomodir atau merespon aspirasi pihak yang dalam hal ini menjadi subjek/ sasaran kebijakan itu, yakni PKL.

Jadi kembali pada hakekat kebijakan publik itu sendiri dibuat dan diperuntukkan. Keberhasilan penanganan PKL tentunya tidak bisa hanya dengan memberlakukan kebijakan yang tidak merespon aspirasi PKL serta tanpa memperhatikan feedbacknya dikemudian hari. Dalam kasus penelitian ini disimpulkan bahwa kebijakan penanganan PKL hanya dapat mengatur dan menangani PKL untuk jangka pendek, mengingat kebijakan tersebut kurang menyentuh akar permasalahan yang ada. Dan hal tersebut dibuktikan adanya resistensi PKL kendati ada penggusuran PKL, mereka tetap kembali ketempat asal mereka berjualan. Sementara relokasi tempat yang baru kurang memperhatikan letak strategis ekonomis bagi PKL yang selalu muncul justru pada sentra dagang/ keramaian.